PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

LAPORAN KINERJA (LKj)

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

JL. Kawasan Pemerintahan No: 1A. Tobelo
Email : balitbangdahalut@gmail.com

2019

©Hak Cipta : BPPDS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019
Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara,
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun,
baik cetak, fotocopi, microfilm, dan sebagainya

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap syukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara telah selesai menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Litbang dan statistik ini merupakan pertanggungjawaban kinerja sepanjang Tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik tahun 2019 memuat program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Srategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2016 -2021. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurung waktu tahun 2019. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat tersajikan data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian Pengembangan Daerah Dan Statistik secara efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran dan uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan di masa akan datang.

Tobelo, Maret 2020

Kepala Badan
Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik
Kab. Halmahera Utara

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19691119199702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang 1

B. Aspek Strategi Organisasi 2

1. Tugas Pokok, Fungsi & Struktur Organisasi 3

2. Lingkungan Strategis Internal 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi 9

B. Tujuan dan Sasaran 11

C. Perjanjian Kinerja 16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Realisasi Capaian IKU Balitbangda & Statistik 19

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Balitbangda & Statistik 21

C. Realisasi Anggaran 40

BAB IV. PENUTUP 44

LAMPIRAN - LAMPIRAN **45**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik diharapkan menjadi pedoman seluruh unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui hasil rekomendasi Kelitbangan yang inovatif guna menjawab harapan publik yang semakin besar dimasa yang akan datang, seperti yang tergambar dalam Visi Badan Litbang yang mengambil seluruh visi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara periode 2016 – 2021 yaitu "***Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan".***

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Tahun 2019 mempunyai 2 (dua) program prioritas dengan 4 (empat) sasaran program serta 4 (empat) indikator program yang merupakan Cascading dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Utara. Dalam menjalankan program tersebut, telah dirancang berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Tahun 2019 terdapat 20 (Dua Puluh) kegiatan namun 18 (Delapan Belas) kegiatan yang dilaksanakan, yang merupakan penetapan kinerja Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan sasaran program.

Dari segi pembiayaan, untuk tahun 2019 dari besaran anggaran belanja APBD-P Balitbangda & Statistik sebesar Rp. 3.769.230.109,50,- dengan realisasi belanja sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 3.297.994.355,00 atau 87,49 % sehingga anggaran yang tidak bisa direalisasi sebesar Rp. 471.235.754,50,- atau 12,51 %. Dengan capaian sasaran program maupun kegiatan yang berada di angka 87,49 % maka dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target.

Laporan kinerja (LKj) ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik sepanjang tahun 2019 dan selanjutnya dapat sebagai sumber input dan perumusan kebijakan di tahun 2020.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Statistik (Balitbangda & Statistik) Kabupaten Halmahera Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur “FUNGSI PENUNJANG”. Balitbangda dan Statistik ini mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta Statistik Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, maka badan ini diharapkan nantinya menjadi sumber rujukan utama atau Think Tank dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Untuk mengetahui capaian kinerja dan tingkat pencapaian target yang direncanakan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah direncanakan. Salah satu bentuk laporan tentang penilaian dan pertanggungjawaban OPD kepada masyarakat dalam mengukur kinerjanya adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan ini adalah wujud implementasi dari Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selanjutnya LAKIP ini diharapkan sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Aspek Strategis Organisasi

Balitbangda adalah merupakan salah satu OPD yang baru terbentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Balitbangda dan Statistik kemudian ditetapkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Balitbangda dan Statistik adalah merupakan unsur "FUNGSI PENUNJANG" dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. OPD ini dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara adalah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan daerah dan Statistik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, tentunya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Balitbangda dan Statistik adalah merupakan bagian integral dari pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Olehnya itu Balitbangda dan Statistik seharusnya mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Periode 2016-2021 yaitu: "***Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Professional Yang Dilandasi Dengan Kebersamaan dan Berkeadilan***".

Balitbangda dan Statistik dalam mendukung pencapaian visi itu tentunya berdasarkan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Statistik. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas, maka strategi yang dilakukan oleh Balitbangda dan Statistik adalah; (1) Penyediaan sumberdaya, baik sarana dan prasarana dan SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan; (2) mendorong hasil kelitbangan menjadi rujukan kebijakan SKPD lainnya; dan (3) mendorong inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah; (4) Peningkatan ketersediaan data yang valid, akurat dan berkualitas; (5) optimalisasi kualitas penelitian, pengembangan serta informasi / data statistik daerah.

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Statistik di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan statistik pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
b) Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan dan statistik pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
c) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik di pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
d) Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Utara;
e) Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik di Kabupaten Halmahera Utara;

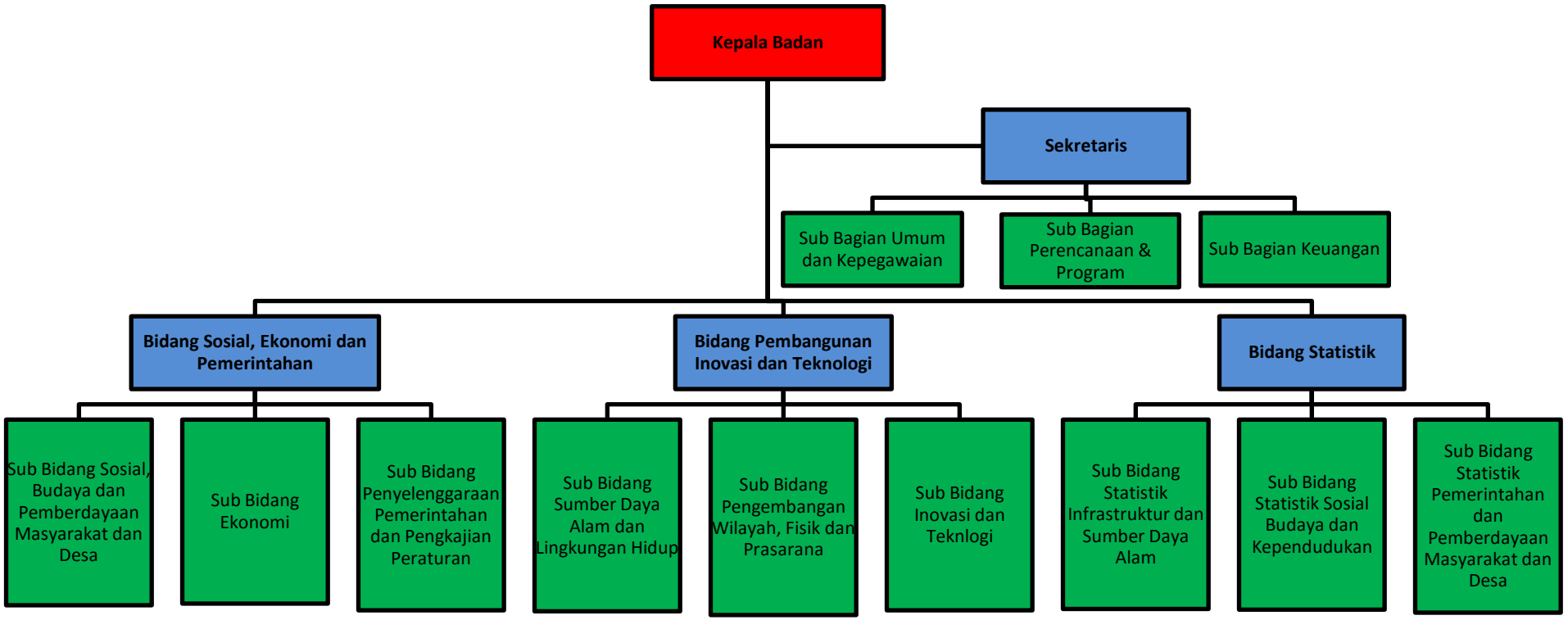
g) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
h) Pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan dan statistik daerah Kabupaten Halmahera Utara; dan
i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur organisasi Badan penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari : **(1) Kepala Badan**; **(2) Sekretaris**, yang terdiri dari (a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Program dan Perencanaan; **(3) Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan** yang terdiri dari (a) Sub bidang Ekonomi; (b) Sub Bidang Sosisl Budaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (c) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Perundangan; **(4) Bidang Pembengunan, Inovasi dan Teknologi**, yang terdiri dari (a) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; (b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; (c) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi; **(5) Bidang Statistik,** yang terdiri dari (a) Sub Bidang Statistik Infrastruktur dan Sumberdaya Alam; (b) Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan; (c) Sub Bidang Statistik Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK KAB. HALMAHERA UTARA

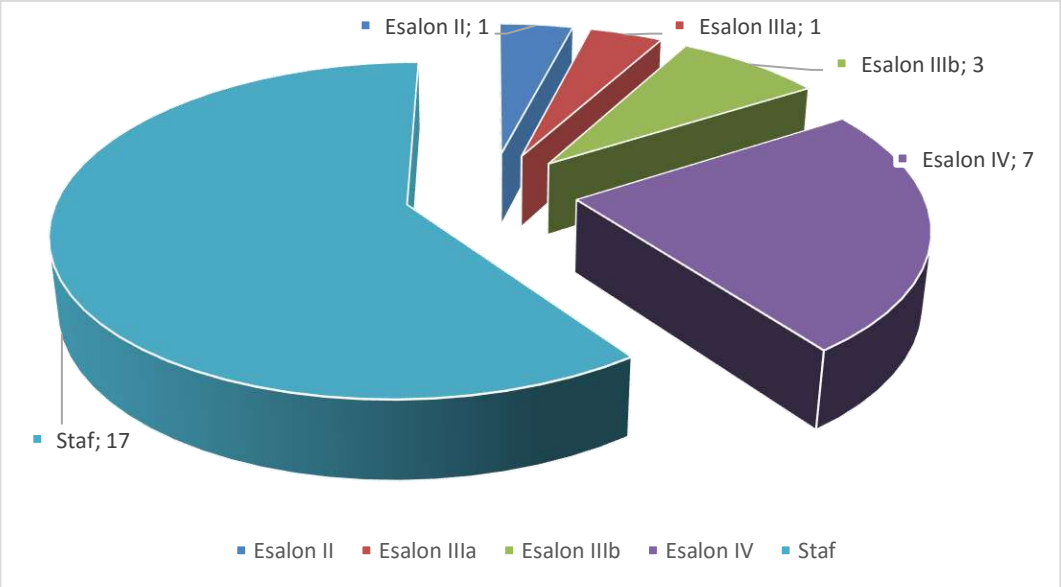


2. Lingkungan Strategis Internal

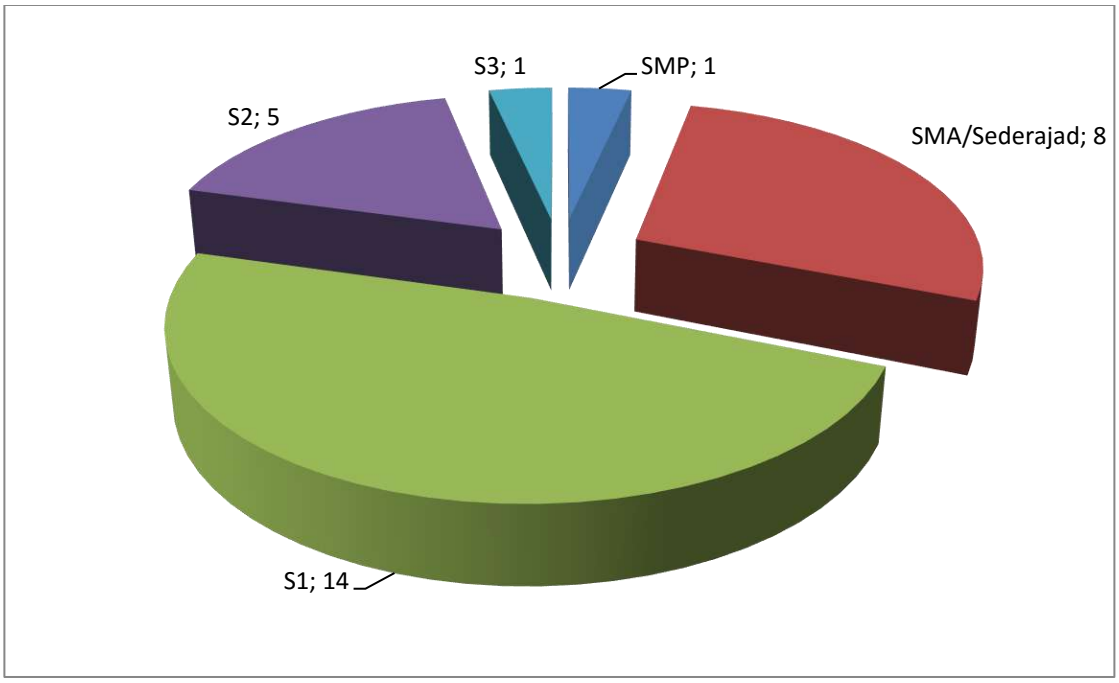
a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi yang bersumber dari lingkungan internal. Secara internal, Kualitas dan Kuantitas SDM adalah penggerak roda organisasi yang berpengaruh secara langsung terhadap organisasi.Saat ini Balitbangda dan Statistik menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 21 Pegawai Negeri Sipil dan 8 Tenaga Honorer / Kontrak dengan kondisi pegawai berdasarkan esalonisasi dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

1.1 Grafik Jumlah Pegawai Sesuai dengan Esalonisasi



1.2 Grafik ASN Menurut Tingkat Pendidikan



Dari Grafik di atas dapat di jelaskan bahwa ASN Pada Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara rata-rata Strata 1 dengan Jumlah ASN sebanyak 14 orang; Strata 2 (Magester) Sebanyak 5 orang; Strata S3 sebanyak 1 orang; SMA/Sederajat berjumlah : 8 orang; dan SMP sebanyak 1 orang.

b. Isu – Isu Strategis Organisasi

Jantung dari proses perencanaan strategis adalah isu – isu strategis organisasi yang berperan utama dalam pengambilan keputusan. Kualitas proses pengambilan keputusan seiring dengan kualitas perencanaan strategis melalui cara meranu isu – isu strategis organisasi.

Dalam rangka mewujudkantujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Balitbangda dan Statistik Kab. Halmahera Utara, maka perlu dipertimbangkan isu-

isu penting sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Adapun isu-isu strategis Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sumberdaya, baik sarana dan prasarana, maupun Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan kinerja aparatur Balitbangda dan Statisik;
3. Peningkatan ketersediaan data yang valid, akurat dan berkualitas, guna menghasilkan dokumen perencanaaan yang berkualitas;
4. Optimalisasi kualitas Penelitian, Pengembangan serta Informasi /Data Statistik Daerah, agar menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
5. Dibutuhkannya kajian tentang Pengembangan potensi PAD
6. Dibutuhkannya kajian tentang Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
7. Dibutuhkannya kajian di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan secara terus menerus
8. Dibutuhkannya pengkajian dan pengembangan Sistim Inovasi Daerah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan disebut sebagai perencanaan kinerja. Rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, programdan kegiatan ditetapkan dalam rencana kinerja. Agenda penyusunan kebijakan anggaran dilakukan seiring dengan penyusunan rencana kinerja, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menjadi tuntutan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Upaya ini dilakukan agar pendekatan perencanaan strategis lebih jelas dan sinergis, sehingga instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

A. VISI DAN MISI

Pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya adalah merupakan visi sebuah organisasi. Visi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik ini dirumuskan, agar organisasi lebih konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Sebuah gambaran yang akan dicapai tentang keadaan masa depan yang berisikan cita – cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh instansi pemerintah adalah kata lain dari visi. Pada batasan tersebut, visi Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara yang mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021, sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MSYARAKAT HALMAHERA UTARA MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PROFESIONAL DILANDASI KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN".

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah:

1. ***Pemerintahan yang baik,*** artinya pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi warga dengan memiliki integritas diri yang kokoh, tidak mudah tergoda untuk memperkaya diri karena jabatan serta mampu melayani masyarakat dengan baik, tetapi memberikan keadilan dan ruang untuk bersaing secara sehat guna mewujudkan impian setiap masyarakat. Pemerintah yang baik juga diwujudkan dengan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Pemerintah fokus pada program meningkatkan dan menciptakan jiwa kewirausahaan untuk mengurangi kemiskinan. Didukung dengan infrastrutur dasar yang memadai. Sehingga hasil perkebunan dapat langsung didistribusikan dari desa ke pelanggan. Dengan memperbaiki jalan produksi. Masyarakat juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diperoleh sebagai hasil dari perwujudan pemerintahan yang baik.
2. ***Profesional,*** artinya memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya.
3. ***Kebersamaan***, artinya pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, sehingga strategi dan rencana pembangunan yang dihasilkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat secara merata karena merupakan kontribusi pemikiran dari seluruh komponen masyarakat.
4. ***Berkeadilan***, artinya bahwa dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi, daerah dalam hal ini organ-organ pemerintahan bertanggung jawab untuk

menjamin pemerataan pendapatan, menjamin pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak *negative* pengaruh globalisasi ekonomi yang menghambat tercapainya kesejahteraan *social*.

Dengan demikian, guna mewujudkan Visi tersebut maka ada empat misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar;
3. Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi Seluruh Warga Masyarakat Dalam Berbagai Aspek Kehidupan;
4. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan;

B. TUJUAN DAN SASARAN

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik (BALIBANGDA & STATISTIK) Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Balitbangda & Statistik Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kab. Halmahera Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN KE -				
				I	II	III	IV	V
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Peningkatan Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik untuk Peningkatan Penelitian/ Kajian dan Pengembangan	Meningkatnya Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik	Presentase Peningkatan Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik	30 %	50 %	75 %	85 %	100 %
2	Meningkatnya Rekomendasi hasil Penelitian/ Kajian dan Pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang di Tindak Lanjuti	Meningkatnya Penelitian/ Kajian Isu – Isu Aktual di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	Presentasi hasil Penelitian/ Kajian dan Pengembangan di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di Tindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	0 %	50 %	80 %	80 %	80 %

3	Meningkatnya rekomendasi hasil Penelitian/Kajian dan Pengembangan di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi yang di tindak lanjuti dan Penerapan Sistim Informasi Daerah	Peningkatan Penelitian/Kajian isu aktual di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi dan Penerapan Sistim Informasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0 %	10 %	15 %	20 %	25 %
			Persentase Kebijakan Inovasi yang tetapkan dalam bentuk rekomendasi kepala daerah	0 %	50 %	50 %	50 %	50 %
4	Tersedia Data dan informasi OPD yang baik (Akurasi, Faktual dan Aktual) (SIDa) yang dimanfaatkan untuk Kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan Data OPD yang Online (Akurat dan Akuntabel) pada bidang data : Data Penduduk, Data Pendikan, Data Kesehatan, Data Infrastruktur, Data Sosial Budaya, Data Sumber Daya Alam, Data PDRB, Data Kemisinan, Data DDA, Data Pertanian dll..	Persentase Data OPD yang Terupdate dalam Sistem	0 %	67 %	100 %	100 %	100 %

Strategi dan Kebijakan

Badan Penelitian, pengembangan Daerah & Statistik Kab. Halmahera Utara

Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan				
Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arahan Kebijakan**
1	**Tujuan 1 :** Meningkatnya Kapasitas ASN untuk peningkatan Penelitian/Kajian /Analisisi dan Pengembangan di Badan penelitian pengembangan daerah dan statistik	**Sasaran 1.1 :** Peningkatan kapasitas ASN untuk mendukung hasil Penelitian/Kajian /Analisisi / Pengembangan dan statistik	**Strategi 1.1.1 :** Meningkatkan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Balitbangda dan Statistik, meliputi sarana, prasarana, kelembagaan.	**Arahan Kebijakan 1.1.1 :** Penyediaan Fasilitas Pendukung, Kantor dan Laboratorium
			Strategi 1.1.2 : Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara	**Arahan Kebijakan 1.1.2 :** Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dan ASN sebagai tenaga peneliti
2	**Tujuan 2 :** Meningkatnya rekomendasi hasil Penelitian/Kajian /Analisisi dan Pengembangan di Badan di Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	**Sasaran 2.1 :** Peningkatan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	**Strategi 2..1.1:** Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Sosial dan Budaya	**Arahan Kebijakan 2.1.1:** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Dalam Negeri
			Strategi 2.1.2 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual dalam bidang kesehatan	**Arah Kebijakan 2.1.2 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 2.1.3: Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Pendidikan	**Arahan Kebijakan 2.1.3:** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Dalam Negeri
			Strategi 2.1.4 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa	**Arah Kebijakan 2.1.4 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait

			Strategi 2.1.5 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Ekonomi	**Arah Kebijakan 2.1.5 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 2.1.6 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	**Arah Kebijakan 2.1.6 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 2.1.7 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Peraturan	**Arah Kebijakan 2.1.7 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 2.1.8 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah	**Arah Kebijakan 2.1.8 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
3	**Tujuan 3 :** Meningkatnya rekomendasi hasil Penelitian/Kajian /Analisisi dan Pengembangan di Badan Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi yang di tindak lanjuti dan Penerapan Sistem Informasi Daerah	**Sasaran 3.1 :** Peningkatan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi dan Peningkatkan Penerapan Sistem Informasi Daera (SIDa)	**Strategi 3.1.1 :** Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup.	**Arahan Kebijakan 3.1.1:** Mengoptimalkan kerjsama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 3.1.2 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	**Arahan Kebijakan 3.1.2 :** Mengoptimalkan kerja sama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 3.2 : Meningkatkan Kualitas perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah dan Kebijakan Inovasi yang di terapkan	**Arahan Kebijakan 3.2 :** Peningkatan Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi dan kebijakan inovasi yang di terapkan di daerah
4	**Tujuan 4 :** Tersedia data dan informasi yang baik (Akurasi, Faktual dan Aktual) yang dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah	**Sasaran 4.1 :** Peningkatan Penyediaan data yang akurasi, factual dan akuntabel meliputi Data Penduduk, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, PDRB, Kemisinan, DDA, Pertanian, Kebudaya dan Data lainnya	**Strategi 4.1.1:** Meningkatkan kualiatas penyediaan data yang akurasi, factual dan akuntabel meliputi data : Data Penduduk, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, PDRB, Data Kemisinan, DDA, Pertanian, Kebudayan dan Data lainnya	**Arahan Kebijakan 4.1.1:** Mengoptimalkan kerja sama dengan BPS Daerah dan Provinsi

C. PERJANIJIAN KINERJA

Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja disebut dengan perjanjian kinerja. Komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia diwujudkan melalui perjanjian kinerja.

Pemanfaatan Dokumen Perjanjian Kinerja ini oleh Balitbangda Kab. Luwu Utara adalah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan;
3. Menilai Keberhasilan Organisasi.

Balitbangda & Statistik Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan perjanjian kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja balitbangda & Statistik Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik	Presentase Kapasitan ASN Balitbanda & Statistik yang tersedia	%	75
2	Peningkatan Penelitian/ Kajian isu-isu aktual dibidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	Presentase pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian/ kajia isu – isu aktual di bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	%	80
3	Peneingkatan Penelitian/ Kajian Isu-isu aktual dibidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Presentase pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian/ kajia isu – isu aktual di bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	%	15
			%	50
4	Penyediaan Data yang Online (Akurat dan Akuntabel) (SIDa)	Presentase ketersediaan informasi / data OPD yang baik	%	100

Tabel 2.3. Program Kerja Balitbangda & Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	*2*	*3*	*4*
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	735.296.000,-	APBD
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110.660.000,-	APBD
3	Program Penelitian dan Pengembangan	346.250.000,-	APBD
4	Program Pengembangan Data / Informasi	623.526.935,50,-	APBD
Jumlah Anggaran		***1.815.732.935,50,-***	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik (Balitbangda & Statistik) Kabupaten Halmahera Utara melakukan pengukuran capaian kinerja tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang sesuai dengan dokumen penetapan kinerja.

A. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH & STATISTIK KAB. HALMAHERA UTARA TAHUN 2019

Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 adalah Indikator Kinerja Utama.

Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Balitbangda & Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kab. Halmahera Utara Tahun 2017 – 2018 Terhadap Target 2019.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI		
			2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Presentase peningkatan kapasitas ASN Balitbangda & Statistik	%	64,28	0	0
2	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan di bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	%	0	71,43	33,33
3	Presentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan Inovasi dan Teknologi	%	0	25	43,75
4	Presentase kebijakan inovasi yang ditetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah	%	0	37,50	57,14
5	Persentase Data OPD yang Terupdate dalam Sistim	%	50	100	100

Ket : Tahun 2017, Balitbangda & Statistik baru terbentuk menjadi satu OPD baru, berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2016.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH & STATISTIK.

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kab. Halmahera Utara telah mengukur capaian kinerja untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen penetapan kinerja Balitbangda & Statistik tahun 2019. Tujuan pengukuran capaian kinerja ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Outcome Program dan Output Kegiatan tersebut terlaksana sesuai rencana target yang ingin dicapai pada sasaran dokumen renstra yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan digunakan untuk pengukuran kinerja.

Ada 4 (empat) kategori dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara, yakni :

URUTAN	CAPAIAN	KATEGORI
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	85 % - 100 %	Berhasil
III	65 % - 84 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 65 %	Kurang Berhasil

1. Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara.

Membandingkan antara realisasi kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2019 terhadap realisasi kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kab. Halmahera Utara Tahun 2019 terhadap realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI OUTUT			KET
			2017	2018	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Presentase peningkatan kapasitas ASN Balitbangda & Statistik	***Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur***				
		▪ Pendidikan dan Pelatihan Formal	9	-	-	
		▪ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	0	-	Penyesuaian Anggaran Tahun 2018
2	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan di bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	***Program Penelitian dan Pengembangan***				
		▪ Koordinasi (FGD) Kelitbangan Bidang Sosial Budaya	1 Lap	-	-	
		▪ Koordinasi (FGD) Kelitbangan Bidang Pemerintahan	1 Lap	-	-	
		▪ Koordinasi (FGD) Kelitbangan Bidang Ekonomi	1 Lap	-	-	

		▪ Penelitian /Kajian di Bidang Sosial Budaya	-	1 Kajian	-	
		▪ Penelitian Kajian di Bidang Pengembangan Ekonomi		1 Kajian	1 Kajian	
		▪ Penelitian Kajian Kualitas Pendidikan di Halmahera Utara		1 Kajian	-	
		▪ Penelitian Kajian Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah		1 Kajian	-	
		▪ Dukungan Teknis dan Manajemen Balitbangda dan Statistik			-	Penyesuaian Anggaran
		▪ Workshop Kelitbangan dan Rakerda Tingkat Provinsi Maluku Utara			1 Keg	Penyesuaian Anggaran
3	Presentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan Inovasi dan Teknologi	▪ Kajian dan Pengembangan Eceng Gondok	1 Laporan	1 Kajian	-	
		▪ Penelitian Kajian di Bidang Lingkungan Hidup	-	1 Kajian	-	
		▪ Penelitian Kajian di Bidang Inovasi dan Teknologi	-	1 Kajian	-	
4	Presentase kebijakan inovasi yang ditetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah	▪ Kebijakan Inovasi Daerah / Lomba Inovasi Daerah	-	-	1 Keg	

5	Persentase Data OPD yang Terupdate dalam Sistim	***Program Pengembangan Data / Informasi***				
		▪ Pengumpulan, Updating dan Analisis Data / Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		▪ Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
		▪ Penyediaan Sistim dan Pengembangan Data dan Informasi yang Berkualitas (Aktual, Fakta dan Akurat) / Sistim Informasi Daerah (SIDA)		1 Paket	-	
		▪ Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB		1 Dok		Tidak di Laksanakan
		▪ Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB		1 Dok		
		▪ Updatting Data Statistik dalam Sistim			1 Keg	Tidak Terlaksana

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 terjadi beberapa perubahan mendasar terkait penataan Struktur Organisasi Perangkat Daeah (OPD) memantapkan indikator kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja lebih di spesifikasi agar lebih SMART dalam upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

Terjadi perbedaan kegiatan serta target kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019, disebabkan perubahan / penyesuaian yang sementara dilakukan terhadap dokumen RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021. Pada Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2019 terjadi perubahan beberapa kegiatan dan target menyesuaikan isu aktual di daerah. Kegiatan – kegiatan tersebut anatar lain :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada tahun 2017 menjadi Bimbingan Teknis dan Implementasi peraturan Perundang – Undangan Tahun 2018, Tahun 2019 tidak di anggarkan karena kondisi keuangan daerah
2. Kegiatan FGD Kelitbangan di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan di Tahun 2017 dengan target 3 Laporan menjadi Kegiatan Penelitian/ Kajian di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah di Tahun 2018 dengan Target 3 Kajian, namun di Tahun 2019 akibat kondisi keuangan daerah menjadi 1 kajian yaitu penelitian / kajian di bidang pengembangan ekonomi.
3. Kegiatan Penelitian/ Kajian Kualitas Pendidikan di Halmahera Utara dengan terget 1 Kajian di Tahun 2018, namun Tahun 2019 tidak lagi beranggaran pada kegiatan di maksud
4. Kegiatan Workshop Kelitbangan dan Rakerda Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 dan 2018 pelaksanaannya di Kabupaten lainnya dan Tahun 2019 pelaksanaannya di Kab. Halmahera Utara sehingga beranggaran di Tahun 2019.
5. Kajian di Bidang Lingkungan Hidup hanya beranggaran di Tahun 2018, di tahun 2017 dan 2019 tidak beranggaran lagi

6. Kajian dan Pengembangan Eceng Gondok dengan target 1 laporan di Tahun 2017 menjadi 1 Kajian di tahun 2018. Tahun 2019 tidak beranggaran lagi.
7. Penelitian / Kajian di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi hanya beranggaran di Tahun 2018, tahun 2017 tidak termuat dalam renja dan Tahun 2019 tidak beranngaran karena kondisi keuangan daerah.
8. Kegiatan Kebijakan Inovasi Daerah / Lomba Inovasi Daerah Tahun 2019 dengan target 1 Kegiatan, Tahun 2017 tidak termuat dalam rencana kerja dan Tahun 2018 tidak beraggaran, karena masih fokus untuk kagiatan yang bersifat kajian.
9. Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data / Informasi Capaian Target Kinerja program dan kegiatan dengan target 1 laporan di Tahun 2017 menjadi 1 Dokumen di Tahun 2018 danTahun 2019.
10. Kegiatan penyusunan dan Pengumpuan Data Statistik Daerah di tahun 2017 tidak beranggaran, sedangkan Tahun 2018 dan 2019 menjadi masing – masing 1 Dokumen
11. Kegiatan Penyediaan sistim Pengembangan Data dengan target 1 Paket hanya di anggarkan di tahun 2018
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB dan Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB dengan target masing – masing 1 Dokumen di tahun 2018 tidak lagi di anggarkan di tahun 2019 dengan terget tertentu sebab kegiatan tersebut merupakan tupoksi BPS .
13. Kegiatan Updatting Data Statistik dalam Sistim dengan Terget 1 Kegiatan di Tahun 2019, sedangkan di Tahun 2017 dan 2018 tidak termuat dalam Rencana Kerja Balitbangda & Statistik.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Mencermati pelaksanaan program dan anggaran pada Badan Litbang selama ini, terutama yang dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja, disebabkan beberapa faktor antara lain:

2.1. KENDALA

2.1.1. Aspek Tatalaksana:

a. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih dilaksanakan secara konvensional dimana masih sangat bergantung pada pemanfaatan personil terutama tenaga fungsional peneliti di internal Badan Litbang yang relatif terbatas. Hal ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara time series, yaitu pelaksanaan satu kegiatan kelitbangan harus menunggu selesainya kegiatan kelitbangan lainnya atau belum dapat dilaksanakan secara paralel.

b. Implementasi Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangandi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaksana kelitbangan di lingkungan Badan Litbang Kemendagri, disamping belum terciptanya perubahan pola pikir secara mendasar terhadap perlunya pengaturan SOP dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagai konsekuensi penerapan reformasi birokrasi.

c. Masih kurangnya bentuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan jurnal ilmiah yang dikelola BPP Daerah. Pembinaan dan fasilitasi dilakukan khususnya pada jurnal yang akan mengajukan akreditasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau pun jurnal yang sedang dalam proses pemeliharaan akreditasi.

2.1.2. Aspek SDM:

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan belum tersedianya tenaga fungsional perekayasa sebagai personil utama penyelenggaraan kegiatan kelitbangan pada Balitbagda & Statistik, yang berdampak pada terbatasnya cakupan isu yang dapat ditangani, serta kualitas hasil kelitbangan yang dapat diangkat/ditindaklanjuti sebagai input rekomendasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan.

b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan yang berdampak pada dukungan dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Litbang.

c. Masih perlunya penegasan terhadap peran/dukungan LIPI dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional peneliti kepada lembaga Litbang pemerintah pusat dan daerah, termasuk tenaga fungsional peneliti Litbang Kemendagri, terkait penyediaan dan penguatan kompetensi jabatan fungsional peneliti.

d. Belum tersedianya tenaga ahli/expert sebagai tenaga pendamping fungsional peneliti Litbang dalam memberikan masukan, tanggapan, pendapat, serta koreksi dan penyempurnaan proses kegiatan secara menyeluruh, termasuk dalam penyediaan konsep dan strategi pengembangan lembaga Litbang. Hal ini sangat dipengaruhi pula oleh terbatasnya alokasi anggaran Badan Litbang.

2.1.3. Aspek Program dan Anggaran:

a. Masih diperlukannya penajaman rumusan atas rencana topik-topik kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada tindaklanjut isu-isu strategis dan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah, sehingga hasil kelitbangan dimaksud mempunyai nilai manfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

b. Masih diperlukannya penajaman dan pencermatan atas distribusi, struktur, dan pola pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan terbatasnya dukungan alokasi anggaran Badan Litbang, serta kemampuan penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tertentu.

c. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jenis-jenis kegiatan lingkup Badan Litbang secara lebih variatif dan dinamis, terutama untuk mendorong peningkatan peran dan fungsi kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dari berbagai aspek, termasuk dukungan pelaksanaan inovasi daerah.

d. Adanya kebijakan pemotongan Anggaran yang sanagt signifikan terhadap kegiatan kelitbangan sehingga berdampak terhadap capaian atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

2.1.4. Aspek Kerjasama:

Kolaborasi bentuk-bentuk kerjasama kelitbangan dengan stakeholder di tingkat pusat maupun daerah belum dapat terwujud secara optimal, baik dalam bentuk implementasi kesepakatan kerjasama maupun penyediaan payung hokum kerjasama kelitbangan antar stakeholeder.

2.1.5. Aspek Pendukung lainnya:

a. Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis sebagai bahan rekomendasi pengambilan langkah dan kebijakan pada tingkat pimpinan.

b. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung terutama meubelair yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia.

3. Analisis Terhadap Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan daerah & Statistik Tahun 2019 sebagaimana telah di paparkan pada Bab II dokumen Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan tahun pasca penetapan Perangkat Daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di ikuti PERDA Kabupaten Halmahera Utara Nomor 44 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara hal ini menyebabkan di revisinya RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah menyesuaikan regulasi yang ada.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membangdingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sesuai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Blitbangda & Statistik beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Target Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik	Presentase Kapasitas ASN Balitbanda & Statistik yang tersedia	***Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur***			
			▪ Pendidikan dan Pelatihan Formal	9 OK	0	0
			▪ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	-	-
2	Peningkatan Penelitian/ Kajian isu-isu aktual dibidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	Presentase pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian/ kajia isu – isu aktual di bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	**Program Penelitian dan Pengembangan**			
			▪ Penelitian Kajian di Bidang Pengembangan Ekonomi	3 Kajian	1 Kajian	33,33

3	Peneingkatan Penelitian/ Kajian Isu-isu aktual dibidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Presentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam penerapan Inovasi dan Teknologi	▪ Kebijakan Inovasi Daerah / Lomba Inovasi Daerah	32 OPD	14 OPD	43,75
		Presentase Kebijakan inovasi yang ditetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah		1 Rek	1 Rek	100
4	Penyediaan Data yang Online (Akurat dan Akuntabel) (SIDa)	Persentase Data OPD yang Terupdate dalam Sistim	▪ Pengumpulan, Updating dan Analisis Data / Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Dok	1 Dok	100
			▪ Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	1 Dok	1 Dok	100
			▪ Updatting Data Statistik dalam Sistim	1 Keg	0	0

Realisasi target kinerja terhadap 4 (Empat) sasaran strategis seperti pada Tabel 3.3. di atas dapat dilaksanakan. Berdasarkan penetapan kinerja (TAPKIN) perubahan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2019, maka pengukuran capaian kinerja kegiatan di Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara yang mengalami beberapa perubahan pada DPA Perubahan Balitbangda & Statistik Tahun Anggaran 2019 menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1 :
Meningkatnya Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik

Ada 1 (Satu) indikator kinerja yang dicapai pasa sasaran ini yaitu “Presentase Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik yang tersedia dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) Program dan 2 (Dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
    a. Pendidikan dan Pelatihan Formal, merupakan pelatihan yang dilakukan secara formal oleh lembaga tertentu kepada ASN Balitbangda & Statistik dalam rangka menguasai ketrampilan tertentu sesuai tugas poko dan fungsi Balitbangda & Statistik. Capaian kinerja Tahun 2019 pada kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak stabil sehingga proses penyesuain dilakukan pada saat APBD-P Balitbangda & Statistik degan capaian kinerja 0 %.
    b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan, juga merupakan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumberdaya ASN di lingkup Balitbangda & Statistik. Capaian kinerja Tahun 2019 pada kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan juga karena kondisi keuangan daerah yang tidak

stabil sehingga proses penyesuain dilakukan pada saat APBD-P Balitbangda & Statistik dengan capaian kinerja 0 %.

Sasaran 2:
Peningkatan Penelitian/ Kajian isu – isu Aktual di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan

Ada 1 (satu) indikator kinerja yang dicapai pada sasaran strategis ini yaitu "Presentase pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian/ kajian isu – isu aktual dibidang sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan". Dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan, dengan kegiatannya :
   a. Penelitian / Kajian di Bidang Pengembangan Ekonomi, merupakan suatu bukti hasil kajian tentang "***Kajian Strategi Pengembangan Pala Organik sebagai Distinctive And Brand comodity Halmahera Utara***". Kegiatan tersebut di jadikan sebagai proses dalam pencapaian target kinerja BALITBANGDA DAN STATISTIK Tahun 2019. Dengan target capain 3 Dokumen Kajian berdasarkan sasaran strategis, namun karena kondisi keuangan daerah sehingga di tuntut untuk menyesuaikan anggaran pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga hanya satu kegiatan kajian di bidang pengembangan ekonomi yang terealisasi yaitu 1 Dokumen kajian. Dokumen kajian ini memuat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam penerapannya pada program dan kegiatannya di tahun berikutnya, dengan capaian kinerja 33,33 %.

Sasaran 3:
Peningkatan Penelitian/ Kajian isu – isu Aktual di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Ada 2 (Dua) indikator kinerja yang dicapai pada sasaran strategis ini yaitu "Presentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi dan Teknologi serta Presentase kebijakan Inovasi yang ditetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah ". Dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan, dengan kegiatannya :
   a. Kebijakan Inovasi Daerah / Lomba Inovasi Daerah, merupakan suatu pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mencapai target yang telah di tetapkan sesuai dengan Revisi APBD-P yang di tetapkan pada tanggal 29 Agustus 2019, maka Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik melaksanakan kegiatan ***Pengembangan Inovasi Daerah (Lomba Inovasi Daerah)***. Dari hasil penilaian Tim yuri daerah berdasarkan kriterianya yang ditetapkan menghasilkan 14 inovasi terbaik dari 13 Organsasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 Kecamatan dengan target tahun 2019 sebanyak 21 OPD, sehingga realisasi capaian tahun 2019 sebesar 66,67 %.

Tahun 2019 target yang telah di tetapkan sebanyak 21 OPD yang di fasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah. Namun hasil seleksi tim juri menunjukan sebanyak 13 OPD / Kecamatan yang telah menerapkan Inovasi Daerah antara lain : RSUD Tobelo, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas PU dan Penataan Ruang, Bagian Administrasi dan PP Setda, Dinas Pertanian, Bagian Hukum dan HAM Setda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kecamatan Tobelo Tengah (Desa Pitu), Sekretaris Dewan, BKD dan PSDA, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang ditetapkan dalam 1 (satu) Rekomenasi / Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 415 / 319 / HU / 2019 tentang Penetapan Inovasi Daerah serta Perangkat Daerah yang telah

melaksanakan uji coba Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 (*Terlampir*). Dengan capaian kiberja 100 %.

Sasaran 4:
Penyediaan Data yang Online (Akurat dan Akuntabel) (SIDa)

Ada 1 (Satu) indikator kinerja yang dicapai pada sasaran strategis ini yaitu "Presentase Data OPD yang terupdate dalam Sistim". Dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program dan 3 (Tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data / Informasi, dengan kegiatannya :
   a. Pengumpulan, Updatting dan Analisis Data / Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan, dilaksanakan dengan menghimpun, mengupdate, serta menganalisis data capaian program / kegiatan pada 32 OPD dan 17 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara sebagai acuan dalam perencanaan Kabupaten Halmahera Utara. dengan output kegiatan 1 Laporan, dapat dicapai 100 %.
   b. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah, dilaksanakan dengan menghimpun semua data sektoral daerah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka menunjang perencanaan daerah dengan output 1 Dokumen Buku One Data Halmahera Utara dan dicapai 100 %.
   c. Updattig data Statistik Daerah dalam Sistim, dilaksanakan dengan mengupdate data statistk daerah ke website pemerintah daerah Kabupaten Halmahera sehingga data sektorral daerah dapat di akses dalam rangka keperluan pihak pengguna, dengan output 1 kegiatan dan capaian 100 %.

Pengukuran indicator tersebut dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan Updatting data sectoral pada 32 OPD dan 17 Kecamatan di Kab. Halmahera Utara yang terampung dalam Buku One Data Mantap, dengan Target 100 %.

Capaian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2017 dan Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel 3.4. dibawah ini,

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kab. Halmahera Utara
Tahun 2017, 2018 dan 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI			CAPAIAN KINERJA		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatnya Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik	Presentase Kapasitas ASN Balitbanda & Statistik yang tersedia	75 %	64,28 %	0	0	85,71 %	0	0
2	Peningkatan Penelitian/ Kajian isu-isu aktual dibidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	Presentase pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian/ kajia isu – isu aktual di bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	80 %	0 %	71,43 %	33,33 %	0 %	89,29 %	41,66 %

3	Peneingkatan Penelitian/ Kajian Isu-isu aktual dibidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Presentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam penerapan Inovasi dan Teknologi	15 %	0 %	25%	43,75 %	0 %	166 %	292 %
		Presentase Kebijakan inovasi yang ditetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah	50 %	0 %	37,50 %	57,14 %	0 %	75 %	114 %
4	Penyediaan Data yang Online (Akurat dan Akuntabel) (SIDa)	Persentase Data OPD yang Terupdate dalam Sistim	100 %	50 %	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %

Secara umum pencapaian kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2019 terhadap 5 (Lima) indikator sasaran yang diukur dapat di kategorikan "**Berhasil".** Dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja di atas, sebagai berikut :

1) Indikator sasaran ***"Presentase Kapasitas ASN Balitbangda dan Statistik yang tersedia"*** yang ditargetkan 75 % untuk melihat konsistensi terhadap jumlah ASN di lingkup Balitbangda & Statistik yang melakukan peningkatan kapasitas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, namun akibat kondisi keuangan daerah maka program / kegiatan yang mendukung indikator sasaran ini tidak di anggarkan Tahun 2019 sehingga realisasi dan capaian kinerjanya 0 % sehingga dikategorikan **Kurang Berhasil**.
2) Indikator sasaran ***"Presentase Pemenfaatan Rekomendasi Hasil Penelitian/ Kajian Isu – Isu Aktual di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan"*** yang ditargetkan 80 %, untuk melihat hasil – hasil kelitbangan (penelitian/kajian/pengembangan) di bidang sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan capaian kinerja 41,66 %, sehingga dikategorikan **Kurang Berhasil**, disebabkan karena kondisi keuangan daerah dalam membiayai 3 (Tiga) kegiatan yang termuat dalam Renja Balitbangda & Statistik untuk mendukung indikator sasaran ini sehingga hanya 1 (satu) kegiatan di bidang pengembangan ekonomi yang dilaksanakan dengan realisasi capaiannya 33,33 %.
3) Indikator Sasaran ***"Presentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi dan Teknologi"*** yang ditargetkan 15 %. Indikator ini melihat jumlah perangkat daerah yang difasilitasi untuk penarapan inovasinya dengan capaian kinerja 292 % yang dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal ini terlihat dengan adanya target dalam indikator sasaran ini sangat kecil di tahun 2019 sehingga perlu di tingkatkan lagi target kinerja di tahun berikutnya mengingat masih banyak hasil – hasil karya inovasi pada setiap perangkat daerah yang belum terakomodir secara keseluruhan.
4) Indikator sasaran **"Presentase Kebijakan Inovasi yang ditetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah"** yang ditargetkan 50 %. Indikator ini dimaksudkan untuk jumlah kebijakan inovasi yang sudah di terapkan

berdasarkan berdasarkan rekomendasi kepala daerah dengan capaian kinerjanya 114 % dengan kategori **Sangat Berhasil** , hal ini didasarkan pada jumlah inovasi yang telah diterapkan pada OPD berbanding sama dengan jumlah inovasi yang diusulkan dalam penetapan rekomendasi kepala daerah sebagai inovasi daerah.

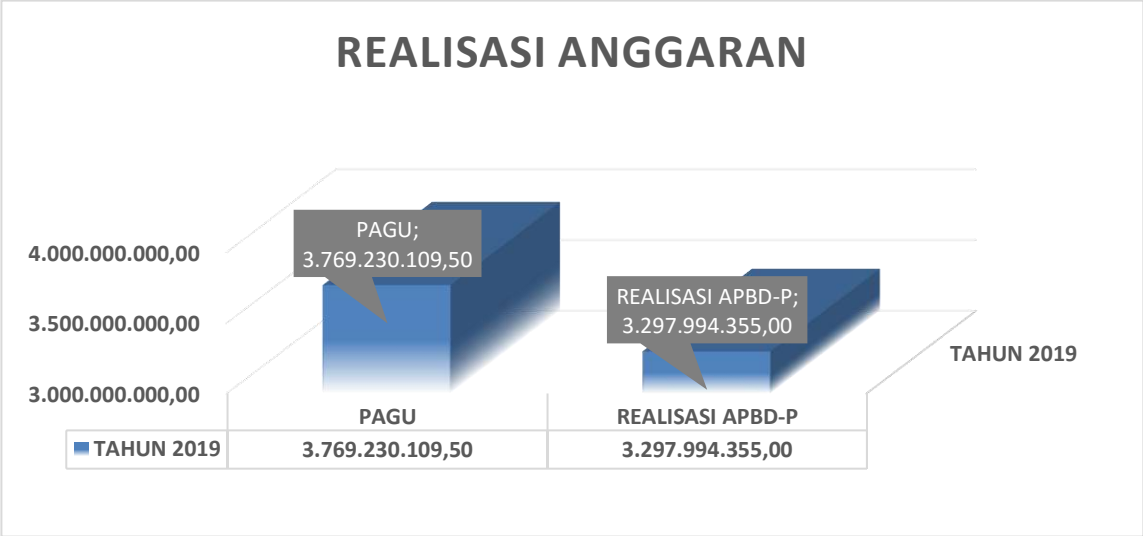
5) Indikator sasaran **"Presentase data OPD yang Terupdate dalam Sistim"** yang ditargetkan 100 %. Indikator ini dimaksudkan untuk melihat semua data sektoral OPD Kabupaten Halmahera Utara secara online yang terupdate dalam website Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Capaian kinerja di Tahun 2019 100 % dengan kategori **Berhasil.** Hal ini didasarkan pada ketersediaan data sektoral OPD yang yang tesusun dalam buku One Data Matap yang online guna kebutuhan pemenfaatan para pemangku kepentingan.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara APBD-P Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp. 3.769.230.109,50 Realisasi anggaran dimaksud dapar dirinci sebagai berikut :

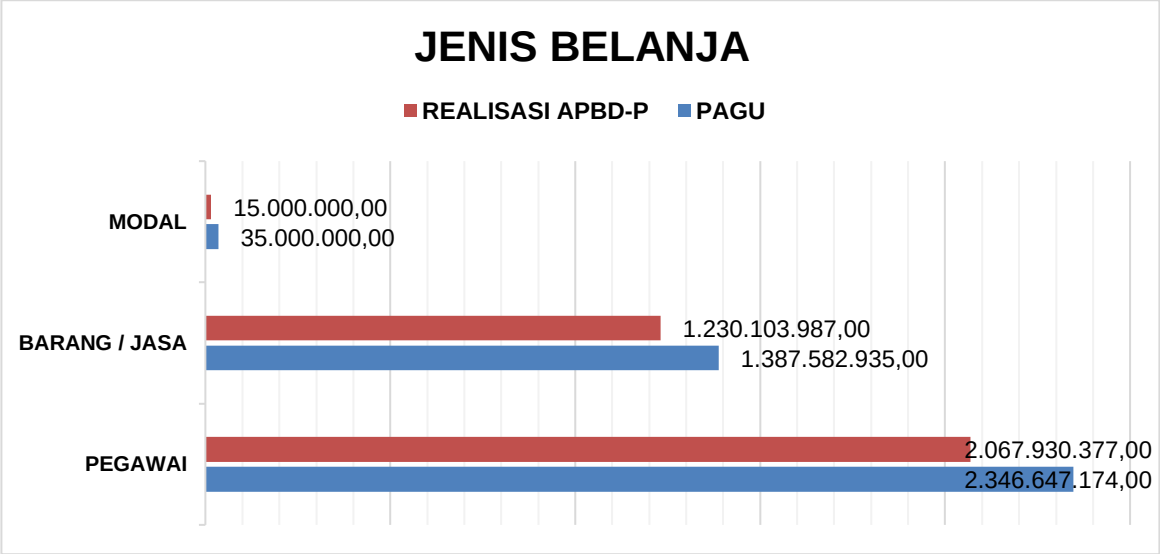
a. Perkembangan Realisasi

Perkembangan realisasi anggaran Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Total Pagu Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Tahun 2019 sebesar Rp. 3.769.230.109,50,- dengan penyerapan sebesar Rp. 3.297.994.355,00,- atau 87,49 % dari pagu anggaran.

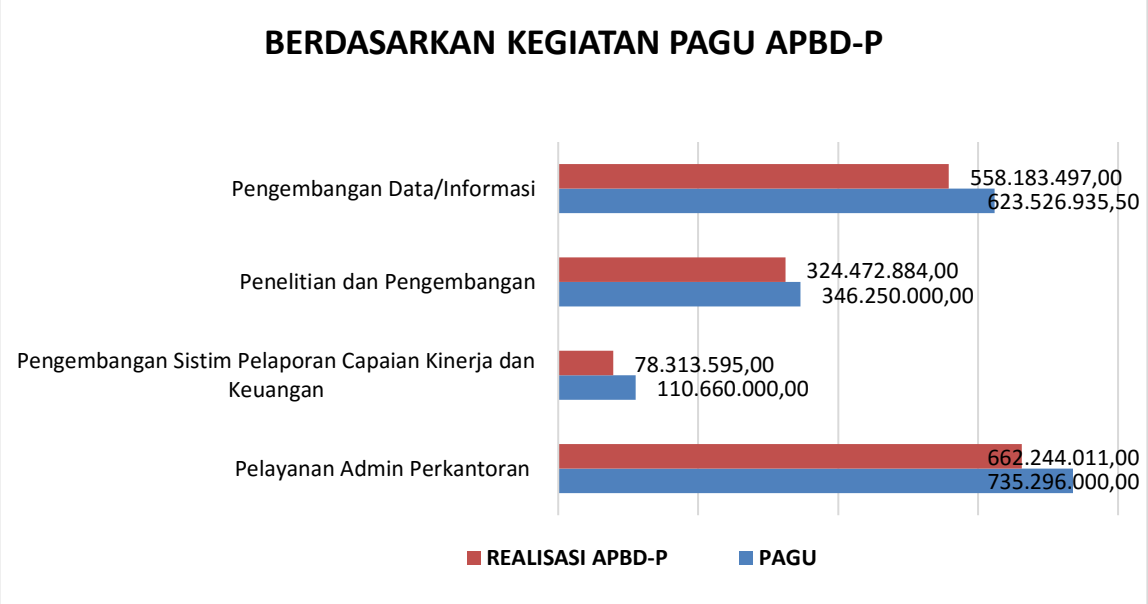
b. Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja



Dari gambar diatas, realisasi anggaran Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik berdasarkan pembagian jenis belanja selama TA 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai berupa : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Honor Kegiatan) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.346.647.174,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.067.930.377- atau 88,12 %.
2) Belanja Barang berupa : Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.387.582.935,00,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.230.103.987,00,- atau 88,65 %.
3) Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar 35.000.000,00,- telah terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00,- atau 42,86 %.

c. Realisasi Berdasarkan Kegiatan



Dari gambar diatas, realisasi anggaran Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik hingga berakhir TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Data / Informasi dengan alokasi anggaran APBD-P sebesar Rp. 623.526.935,- telah terealisasi sebesar Rp. 558.183.497,- atau 89,52 %.
2) Program Penelitian dan Pengembangan dengan alokasi anggaran APBD-P sebesar Rp. 346.250.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 324.472.884,- atau 93,71 %
3) Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran APBD-P sebesar Rp. 110.660.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 78.313.595,- atau 70,77 %.
4) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran APBD-P sebesar Rp. 735.296.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 662.244.011,- atau 90,06 %.

BAB 1V
PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2019 pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan tinjauan secara umum berdasarkan pencapaian indikator sasaran dan pencapaian kinerja. Sebagaimana uraian capaian kinerja terhadap 4 (empat) sasaran kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian, pengembangan Daerah & Statistik Tahun Anggaran 2019, capaian target kinerja sebagai berikut :

1. Presentase Peningkatan Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik dengan target 75 %, namun akibat kondisi keuangan daerah sehingga indikator kinerja ini tidak dianggarakan sehingga pencapaian kinerjanya 0 %.
2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan dibidang sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan dengan target 80 %, oleh karena kondsi keuangan daerah sehingga hanya 1 kegiatan kajian di bidang ekonomi yang dilaksanakan dari target 3 kegiatan kajian, realisasi kinerja sebesar 33,33 %, dengan capaian kinerjanya sebesar 41,66 %.
3. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah dengan target 15 %, sampai hingga akhir TA 2019 sebanyak 14 (empat belas) hasil inovasi OPD yang telah difasilitasi dari jumlah OPD di kabupaten Halmahera Utara dengan realisasi kinerja sebesar 43,75 % dengan capaian kinerja 292 %,
4. Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah ditargetkan 50 %, sampai akhir Tahun anggaran 2019 realisasi kinerja berdasarkan jumlah inovasi yang diterapkan pada OPD sebesar 57,14 % dengan capaian kinerjanya sebesar 114 %.
5. Presentase data OPD yang terupdate dalam sistim ditargetkan 100 %, sampai hinga akhir TA 2019 realisasi kinerja sebesar 100 %, dengan capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya T.A. 2019 mencapai Rp. 3.297.994.355,00,- atau 87,49 % dari total pagu anggaran APBD-P sebesar Rp. 3.769.230.109,50,-. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 471.235.576,50,- atau 12,51 %.

Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) ini dapat di jadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dari permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dalam lingkup internal Balitbang guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Badan Penlitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara ke depannya.

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Ir. FRANS MANERY
Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ir. FRANS MANERY	**ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd**
	NIP. 19691119199702 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESALON II
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH & STATISTIK KAB. HALMAHERA UTARA
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Kapasitas ASN Balitbangda & Statistik	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik dengan Baik	100 %	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***834.283.500,00,-***
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.255.500,00,-
				Penyediaan Jas Komunikasi, SDA & Listrik	6.000.000,00,-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	92.400.000,00,-
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	50.110.000,00,-
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.500.000,00,-
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.518.000,00,-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.000.000,00,-
				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor	6.550.000,00,-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.850.000,00,-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	48.800.000,00,-
				Penyediaan Makanan dan Minuman	27.000.000,00,-
				Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	204.300.000,00,-
		Tersedianya Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik yang Tepat Waktu	100 %	***Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	***110.660.000,00,-***
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	49.820.000,00,-
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	17.015.000,00,-
				Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD	43.825.000,00,-

2	Meningkatnya Penelitian/ Kajian Isu – isu aktual di bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti Perangkat Daerah	Presentase hasil Peneitian/ Kajian di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	2 Dok	***Program Penelitian dan Pengembangan***	***575.400.000,00,-***
				Dukungan Teknis dan Manajemen Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik	161.120.000,00,-
				Workshop Kelitbangan dan Rakerda Tingkat Provinsi Maluku Utara	195.280.000,00,-
3	Meningkatnya Rekomendasi hasil Penelitian/ kajian dan Pengembangan di bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi yang di tindaklanjuti Perangkat Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi daerah	3 OPD	Kebijakan Inovasi Daerah / Lomba Inovasi Daerah	219.000.000,00,-
		Presentase kebijakan Inovasi Daerah yang di tetapkan dalam Rekomendasi Kepala Daerah	1 Rek		
4	Tersedianya Data Statistik OPD	Presentase Data OPD yang Terupdate dalam Sistim, Antara lain : Data Penduduk, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosbud, Sumberdaya Alam, PDRB, Pertanian, Kebudayaan dan lainnya.	100 %	***Program Pengembangan Data / Informasi***	***623.526.935,50,-***
				Pengumpulan, Updating dan Analisis data / Informasi Capaian Target Kinerja Progran dan Kegiatan	343.925.000,00,-
				Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	143.951.935,50
				Updating Data Statistik Daerah dalam Sistim	135.650.000,00,-

Belanja Tidak Langasung : 1.872.611.622,12,-

Belanja Langsung : 2.143.870.435,50,-

==========

Total Belanja : 4.016.482.057,62,-

TOBELO, 12 FEBRUARI 2019

BUPATI HALMAHERA UTARA

KEPALA BADAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH & STATISTIK
KAB. HALMAHERA UTARA

Ir. FRANS MANERY

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
NIP. 19691119199702 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ADERIUS SERO, S.Pd., M.Sc
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.PD., M.Pd	**ADERIUS SERO, S.Pd., M.Sc**
NIP. 19691119199702 1 002	NIP. 19670806199903 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON III

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Prosentase Unit Kerja yang Terlayani dengan Baik	100%	Rp 944.943.500,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Tepat waktu	4 Dok	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	135.255.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Rp	6.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp	92.400.000,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	50.110.000,00	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp	13.500.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	45.518.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	23.000.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	6.550.000,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	181.850.000,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan	Rp	48.800.000,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	27.000.000,00	

11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	204.300.000,00	
12	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp	49.820.000,00	
15	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	17.015.000,00	
16	Penyusunan RENSRA dan RENJA SKPD	Rp	43.825.000,00	

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ATBERAHMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
NIP. 19691119997021002

Pihak Kesatu,

ADERIUS SERO, S.Pd., M.Sc
NIP. 19670806199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ELLEN CH. PATTINAMA, S.Pt
Jabatan : Kabid Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.PD., M.Pd
NIP. 19691119199702 1 002

Pihak Pertama,

ELLEN CH. PATTINAMA,S.Pt
NIP. 19690520200312 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON III

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terwujudnya Penelitian/ Pengembangan/ Penerapan/ Pengkajian/ Pengoperasian/ Rekayasa di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	Persentase Hasil Penelitian di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang ditindak lanjuti Pemerintah Daerah	2 Laporan	Rp 356.400.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Dukungan Teknis dan Manejemen Badan Penelitian, Pengembangan	Rp 161.120.000,00	
	Daerah dan Statistik		
2	Workshop Kelitbangan Rakerda Tingkat Provinsi Maluku Utara	Rp 195.280.000,00	

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
NIP. 1969119199702 1 002

Pihak Kesatu,

ELLEN CH. PATTINAMA, S.Pt
NIP. 19690520200312 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : PIETER PATTIASINA, S.AP
Jabatan : Kabid Inovasi dan Teknologi
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.PD., M.Pd	**PIETER PATTIASINA, S.AP**
NIP. 196911191997021002	NIP. 19650322198602 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON III

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terwujudnya Penelitian/ Pengembangan/ Penerapan/ Pengkajian/ Pengoperasian/ Rekayasa di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	10 OPD	Rp 219.000.000,00
		Persentase Kebijakan Inovasi yang ditetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah	1 Rekomendasi	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Kebijakan Inovasi Daerah/ Lomba Inovasi Daerah	Rp 219.000.000,00	

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
NIP. 19691119199702 1 002

Pihak Kesatu,

PIETER PATTIASINA, S.AP
NIP. 19650322198602 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : YEHESKIEL MAURESY, S.PI., M.Si
Jabatan : Kasubag Program dan Perencanaan
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : ADERIUS SERO, S.Pd., M.Sc
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ADERIUS SERO, S.Pd., M.Sc	**YEHESKIEL MAURESY, S.Pi., M.Si**
NIP. 19670806199903 1 007	NIP. 19790725201001 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON IV

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Laporan Kinerja Tepat Waktu	2 Dokumen

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ADERIUS SERO, S.Pd., M.Sc
NIP. 19670806199903 1 007

Pihak Kesatu,

YEHESKIEL MAURESY, S.Pi., M.Si
NIP. 19790725201001 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : DIANA PALAR, SE
Jabatan : Kasubid Ekonomi
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Ellen Ch. Pattinama, S.Pt
Jabatan : Kabid Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ELLEN CH. PATTINAMA, S.Pt	**DIANA PALAR, SE**
NIP. 19690520200312 2 007	NIP. 19790422200501 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON IV

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Penelitian/ Pengembangan/ Pengkajian/ Rekayasa Pengoperasian di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	Persentase hasil Penelitian/ Pengembangan/ Pengkajian/ Rekayasa dan Pengoperasian di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemmerintahan yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	1 Laporan

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ELLEN CH. PATTINAMA, S.Pt
NIP. 19690520200312 2 007

Pihak Kesatu,

DIANA PALAR, SE
NIP. 19790422200501 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : WIBENTORO W.S. HOHAKAY, SP
Jabatan : Kasubid Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : ELLEN CH. PATTINAMA, S.Pt
Jabatan : Kabid Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ELLEN CH. PATTINAMA, S.Pt	**WIBWNTORO W.S. HOHAKAY, SP**
NIP. 19690520200312 2 007	NIP. 19710906201001 1005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON IV

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Penelitian/ Pengembangan/ Penerapan/ Pengkajian/ Rekayasa/ Pengoperasian di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	Presentase hasil Peelitian/ Pengembangan/ Penerapan/ Rekayaa di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah daerah	2 Dokumen

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ELLEN CH. PATTINAMA, S.Pt
NIP. 19690520200312 2 007

Pihak Kesatu,

WIBENTORO W.S. HOHAKAY, SP
NIP. 19710906201001 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : JAYATIRTA IRANO, S.Pd., MT
Jabatan : Kasubid. Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Pieter Pattiasina, S.AP
Jabatan : Kabid Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
PIETER PATTIASINA, S.AP	**JAYATIRTA IRANO, S.Pd., MT**
NIP. 19650322198602 1 001	NIP. 19740328200501 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON IV

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Penelitian/ Pengembangan/ Penerapan/ Pengkajian/ Rekayasa/ Pengoperasian di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	10 OPD
		Persentase Kebijakan Inovasi yang di tetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala Daerah	1 Rekomendasi

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

PIETER PATTIASINA, S.AP
NIP. 19650322198602 1 001

Pihak Kesatu,

JAYATIRTA IRANO, S.Pd., MT
NIP. 19740328200501 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : MARDIANA NINGSI SERO, ST
Jabatan : Kasie. Inovasi dan Teknologi
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Pieter Pattiasina, S.AP
Jabatan : Kabid Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

PIETER PATTIASINA, S.AP
NIP. 19650322198602 1 001

Pihak Pertama,



MARDIANA NINGSI SERO, ST
NIP. 19810504201001 2 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON IV

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Penelitian/ Pengembangan/ Penerapan/ Pengkajian/ Rekayasa/ Pengoperasian di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	10 OPD
		Persentase Kebijakan Inovasi yang di Tetapkan dalam bentuk Rekomendasi Kepala daerah	1 Rekomendasi

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

PIETER PATTIASINA, S.AP
NIP. 19650322198602 1 001

Pihak Kesatu,

MARDIANA NINGSI SERO, ST
NIP. 19810504201001 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : SILWANUS KALATI
Jabatan : Kasubid Pemerintahan & Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Badan
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA – BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd	**SILWANUS KALATI**
NIP. 19691119199702 1 002	NIP. 19740318200008 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON IV

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Penyajian Data yang Akurasi, Faktual dan Akuntabel	Mewujudkan Penyajian dan Ketersediaan Data	75%

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
NIP. 19691119199702 1002

Pihak Kesatu,

SILWANUS KALATI
NIP. 19740318200008 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
(BALITBANGDA DAN STATISTIK)
Jl. Kawasan Pemerintahan No 1 A. Tobelo
www.halmaherautarakab.go.id Kode Pos : 97762

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : RONALDO M. GASPERSZ, S. Hut
Jabatan : Kasubid Statistik Sumberdaya Alam dan Infrastruktur
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Badan
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd.,M.Pd	**RONALD M. GASPERZ, S.Hut**
NIP. 19691119 1997021002	NIP. 19840523201001 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON IV

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Penyajian Data yang Akurasi, Faktual dan Akuntabel	Mewujudkan Penyajian dan Ketersediaan Data	75%

Tobelo, 12 Februari 2019

Pihak Kedua,

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
NIP. 19691119199702 1 002

Pihak Kesatu,

RONALD M. GASPERZ, S. Hut
NIP. 19840523201001 1 009

BUPATI HALMAHERA UTARA

REKOMENDASI
NOMOR : 070/1171

Sehubungan dengan hasil-hasil Kajian/ Riset oleh Tim Kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara, maka Bupati Halmahera Utara memberi Rekomendasi kepada OPD terkait untuk menindaklanjuti Hasil Kajian/ Riset dimaksud dalam Program dan Kegiatan OPD masing-masing. Adapun OPD yang menindaklanjuti hasil Kajian/ Riset sebagai berikut :

No	Hasil Kajian	Tahun Kajian	Tindak Lanjut OPD	Ket
1	Kajian Pegembangan Eceng Gondok di Danau-Danau Galela Kabupaten Halmahera Utara	2018	Dinas Likungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas UMKM & Koperasi, Dinas PUPR, dan Dinas Perikanan & Kelautan	
2	Kajian Sistem Drainase, Air Tergenang dan Kebersihan Lingkungan Kawasan Padat Penduduk di Kecamatan Tobelo dan Tobelo Tengah.	2018	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Kesehatan.	
3	Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2018	Dinas KB, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial	
4	Kajian Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Halmahera Utara	2018	BKD PSDA, Dinas Pemberdayaan Masyakat Desa, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Kesehatan	
5	Kajian Strategi Pengembangan Pala Organik Sebagai Distinctive and Brand Comodity Halmahera Utara.	2018	Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Badan Ketahanan Pangan.	
6	Kajian Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah di Halmahera Utara	2018	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	

Demikian Rekomendasi ini diberikan, untuk dilaksanakan. Terima kasih.

Dikeluarkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 04 Desember 2019

a.n. Bupati Halmahera Utara,

Ir. Frans Manery

BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 415 /391 / HU / 2019

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH SERTA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN UJI COBA INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang;
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat melalui inovasi daerah, diperluhkan penyusunan serta evaluasi pelaksanaan inovasi daerah;
b. bahwa berdasarkan kriteria inovasi daerah, Tim Evaluasi Inovasi Daerah telah menghasilkan usulan Inovasi Daerah serta perangkat daerah yang melaksanakan uji coba Inovasi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perluh menetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Tentang Penetapan Inovasi Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Uji Coba Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019.

Mengingat;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabuapaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi OPD/ASN sebagaimana (daftar terlampir) yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah serta Perangkat Daerah yang di tugaskan melakukan Uji Coba Inovasi Daerah;

KEDUA : Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan (Badan LITBANGDA) Halmahera Utara;

KETIGA : Pelaksana uji coba inovasi daerah harus di dokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksana uji coba inovasi daerah;

KEEMPAT : Selama masa uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuian rancangan inovasi daerah untuk mengahasilkan inovasi daerah yang di inginkan;

KELIMA : Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksana uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Badan LITBANGDA Halmahera Utara;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 11 NOVEMBER 2019

BUPATI HALMAHERA UTARA

FRANS MANERY

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Wakil Bupati Halmahera Utara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Utara;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
6. Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 415/291/ HU/ 2019
Tanggal 11.. NOVEMBER 2019
Daftar : Inovasi OPD yang layak sebagai inovasi daerah dan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah

NO	NAMA OPD/ ASN	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	KET
1.	RSUD Tobelo	Reservasi Online dan Anjungan Tunai Mandiri	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
2.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Mall Pelayanan Publik - "Simantap" (Perijinan Secara On Line)	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	- "Bahagia" (Bayi Lahir Langsung Miliki Akte Lahir	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
4.	Balitbangda dan Statistik	One Data Mantap	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
5.	Dinas PU dan Penataan Ruang	"Lapen Sipetarung" (Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Android"	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
6.	Bagian Administrasi dan PP Setda	Modifikasi Transaksi E-Perjadin Non Tunai	Tata Kelola Pemerintahan	Sudah Jalan
7.	Dinas Pertanian	COMED di Cyber Extension (Komunitas Peduli Data dan Informasi)	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
8.	Bagian Hukum dan HAM Setda	"Si Doi" Sistem Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Tata Kelola Pemerintahan	Sudah Jalan
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	"Generik Dengan Rumah Data" (Gerakan Akses Informasi Perikanan Dengan Rumah Data	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba
10.	Dinas Pertanian	"Komedi" (Komunitas Peduli Data dan Informasi Cyber Extension)	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba
11.	Desa Pitu	Pitu Bersih	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba
12.	Sekretariat Dewan	"SILA ASMARA'(Sentral Informasi dan Layanan Aspirasi Masyarakat)	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba
13.	BKD dan PSDA	"PKeS" (Perjanjian Kinerja Eselon) Terapi SAKIP dan SAKIT	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	"SIMARDI" Sistim Manajemen Arsip Daerah	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba

BUPATI HALMAHERA UTARA

FRANS MANERY